

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Suradji Muhammad. Buku Ajar Sistem Politik Indonesia, n. d.
- Asiva Noor Rachmayani. Sistem Politik Indonesia, 2015.
- Dr. Muhamad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H. Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.” Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI (2006).

Jurnal/Artikel Ilmiah

- AB Waskito. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.” Jurnal Daulat Hukum (2018).
- Achmad Asfi, Burhanudin. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50–67.
- Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 15, no. 01 (July 4, 2020): 121–138.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 8, 2020): 217–238.
- Aziz, Mohammad Rifqi. “Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk *Checks and Balances* Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023).
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. “Rekontruksi Hak Imunitas yang Bermartabat Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Catur Wangsa Berbasis Nilai Keadilan” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Choirulsyah, Darmawan, and Azhar Azhar. “Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama Dalam Menciptakan *Good Governance* Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203.

- Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus Dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 105.
- Deta, Melkianus Umbu, I Nyoman Suandika, and Ida Bagus Anggapurana Pidada. "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)." *Student Research Journal* Vol. 2, no. 4 (2024): 51–52.
- Dewi, Sofi Rahma. "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Acta Law Journal* 1, no. 1 (November 12, 2022).
- Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. "Risalah *Focus Group Discussion* Pimpinan MPR." Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2024
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (May 20, 2016): 001.
- Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Prodi S3, Ilmu Syariah, Pascasarjana Uin, and Antasari Banjarmasin. Membangun Hukum yang adil dalam bingkai Moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*. Vol. 1, 2023.
- Gaffar, and Janedjri M. "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2019).
- Imam Rahmaddani. "Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5, no. 1 (April 28, 2023): 18–34.
- Imania, Diah, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari. "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, 2016.
- Kusuma, Satria Budi. "Hubungan Fungsional Antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan Di Indonesia Menurut UUD 1945." *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).

Nurdin, Zamharira, A Muin Fahmal, Fahri Bachmid, Kata Kunci; Kedudukan, Majelis Kehormatan, and Mahkamah Konstitusi. “Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024).

Patawari, Patawari, and Isnanto Bidja. “Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara.” *Kalabbirang Law Journal* 1, no. 2 (August 31, 2019): 44–66.

Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (May 20, 2016): 661.

Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pentingnya Prinsip Kebijakan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (March 26, 2021): 133.

“Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal Dan Eksternal.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 25, 2021).

Perundang-undangan

Undang -Undang Dasar 1945.

TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015.

Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2010 Tentang Peraturan Kode Etik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Website

Kemas, Syarifuddin, and Gerby Novario. *DPR Honorary Council and The Enforcement of The Code of Ethics*, n. d.
<http://sp.beritasatu.com/home/kontras->.

Mpr, Selayang Pandang “<https://mpr.go.id/tentang-mpr/Selayang-Pandang>”